

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta potensi yang dimilikinya. Desentralisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan.

Salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. (Halim 2016)

Dengan meningkatnya PAD, daerah diharapkan mampu mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemandirian ini menjadi penting karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan prioritas pembangunan yang berbeda-beda,

sehingga kemampuan untuk membiayai kebutuhannya sendiri akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Meskipun otonomi daerah telah berjalan lebih dari dua dekade, kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu menggali potensi pendapatan secara maksimal. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, terutama di daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi lemah atau belum memiliki sistem pengelolaan pendapatan daerah yang efektif. Hal ini tercermin dari komposisi pendapatan daerah yang sebagian besar masih berasal dari DAU dan DAK, sementara kontribusi PAD relatif kecil.(Gianie, 2024)

Selain itu, rendahnya PAD di banyak daerah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, lemahnya basis data wajib pajak, serta masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang keuangan daerah. Tidak sedikit daerah yang hanya mengandalkan sektor-sektor tertentu, seperti pasar tradisional atau parkir, tanpa mengembangkan potensi ekonomi lain yang lebih luas seperti pariwisata, industri kreatif, atau potensi sumber daya alam lokal. (LKPN, 2025)

Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat tidak hanya membuat pembangunan daerah berjalan lambat, tetapi juga mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan strategis. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang

faktor-faktor yang memengaruhi PAD agar daerah dapat melakukan perencanaan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi cukup besar di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan lokal. Namun demikian, tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten TTS masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi besaran PAD agar pemerintah daerah dapat menggali potensi yang ada secara lebih optimal.

Beberapa faktor yang dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten TTS adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu sumber utama PAD, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menarik penerimaan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan retribusi daerah menunjukkan sejauh mana layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, komponen penting lainnya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun penyertaan modal daerah dalam perusahaan swasta. Sementara

itu, lain-lain PAD yang sah meliputi penerimaan dari sumber-sumber seperti penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, klaim asuransi, dan penerimaan sah lainnya.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta Lain-lain PAD yang sah memegang peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Di banyak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun penyertaan modal daerah dalam perusahaan swasta. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah meliputi penerimaan dari sumber-sumber seperti penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, klaim asuransi, dan penerimaan sah lainnya.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta Lain-lain PAD yang sah memegang peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Di banyak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah masih belum optimal dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan. Optimalisasi kedua sumber in menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan daerah secara mandiri

Tabel 1.1

**Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Menurut Jenis Penerimaan (Miliyar Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2015	52.599.669.000
2016	71.848.806.000
2017	189.534.209.000
2018	71.487.909.000
2019	92.122.520.000
2020	64.192.990.000
2021	65.657.453.000
2022	46.784.071.000
2023	86.293.861.000
2024	51.770.000.000

Tabel 1.1 menunjukkan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2015 hingga 2024 dalam satuan ribu rupiah. Data tersebut memperlihatkan fluktuasi penerimaan PAD setiap tahunnya, di mana penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp.189.534.209.000 dan penerimaan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp.46.784.071.000. Secara umum, PAD mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak konsisten sepanjang periode tersebut, mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan daerah. Meskipun sempat melonjak tajam pada tahun 2017 dan 2021, penerimaan kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp51.770.000.000 pada tahun 2024.

Penelitian terdahulu yang dilakukan **Wijaya dan Rahmawati (2018)** berjudul *“Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat”* menemukan bahwa pajak dan retribusi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD. Namun, penelitian ini tidak

mempertimbangkan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel bebas dalam model analisis. **Sari dan Pratama (2020)** dalam penelitian berjudul “*Pengaruh Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur*” menemukan bahwa pajak daerah berkontribusi signifikan terhadap PAD, namun penelitian ini tidak memasukkan variabel retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagai faktor analisis. **Yusuf (2019)** pada studinya yang berjudul “*Analisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung*” menekankan pentingnya retribusi, tetapi tidak memasukkan variabel pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang juga berpotensi memengaruhi PAD.

Kondisi geografis Kabupaten TTS yang sebagian besar masih tergolong wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi juga dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi penerimaan PAD. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara lebih mendalam faktor-faktor yang berperan dalam memengaruhi fluktuasi PAD di Kabupaten TTS. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan strategi dan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kinerja PAD dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten TTS?
2. Bagaimana pengaruh, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten TTS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten TTS
2. Untuk mengetahui pengaruh, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten TTS

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi daerah dan keuangan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis fiskal daerah dan pembangunan ekonomi lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah.